

KONFLIK IDENTITAS (ETNIS) DAN HARGA DIRI

Damianus J. Hali¹

Abstract

The existence of violent identity conflict to result from loose ethnic community self-regard. The situation of ethnic community have not felt regard, the absence of empathy, to get discrimination action from the other ethnic or government to stimulate violence conflict. George Simmel quotes: "Groups, and especially minorities, which live in conflict...often reject approaches or tolerance from the other side. The closed nature of their opposition, without they cannot fight on, would be blurred...Within certain groups, it may even be a piece of political wisdom to see to it that there be some enemies in order for the unity of the members to be effective and for the group to remain conscious of this unity as its vital interest".

Key Words: *Konflik identitas (etnis) . harga diri . perilaku kekerasan . diskriminasi . alam bawah sadar . imej musuh*

Pengantar

Eksisnya sebuah identitas (etnis) sangat tergantung pada pengakuan pihak lain. Ketika identitas sebuah komunitas tidak lagi mendapat pengakuan, bahkan dilecehkan pihak lain maka itu menjadi signal tersingkirnya identitas dari pergaulan sosial. Individu atau komunitas yang empunya identitas akan merasa tidak nyaman, terancam, muncul rasa takut, dsb, jika tidak lagi diakui lingkungannya.

Bila kondisi ini terus berlanjut akan timbul resistensi, karena sejatinya manusia ingin rasa aman, tenang dan damai. Rasa aman yang tidak lagi didapatkan dari komunitas identitas lain akan beralih dan mencari ke komunitas

se-identitas, seperti se-etnis atau se-agama misalnya². Perasaan se-etnis (etnosentrisme) kemudian menguat mengikat para pihak di dalamnya. Namun tak jarang perasaan se-etnis kemudian berkembang ke arah yang tidak rasional; pokoknya se-etnis benar salah harus dibela. Sampai di sini bayangan polarisasi, dikotomi dan masyarakat terkotak-kotak terjadi. Tetabuhan dan saling silang konflik pun akan terjadi manakala komunitas yang dianggap musuh ada di depan mata. Konflik akhirnya dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan pengakuan dan sekaligus rasa aman.

Konflik identitas, terutama berkaitan dengan identitas etnis, suku,

¹ Dosen Pusat Kajian Humaniora (PKH) Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan pada tahun 2003 melakukan penelitian "Rekonstruksi Sosial Pasca Konflik 1999" di Sambas, Kalimantan Barat.

² Lihat, Simon Fisher, dkk, 2000, Mengelolah Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak (terjemahan), The British Council Indonesia (SMK Grafika Desa Putra): Jakarta,

agam atau yang kerap disebut sebagai konflik primordial terjadi akibat absennya pengakuan dan penghargaan dari pihak lain. Padahal pengakuan dan penghargaan sekaligus memperlihatkan penerimaan pihak lain terhadap sebuah komunitas masyarakat. Sebuah komunitas akan merasa aman, tenang dan berharga manakala mereka merasa diterima dan diakui sebagai bagian dari sebuah komunitas besar, seperti bangsa misalnya. Mereka tidak akan memiliki cukup alasan untuk cemas, terancam dan takut terhadap kehadiran komunitas lain yang berbeda identitas dengan mereka.

Perjuangan Mempertahankan Harga Diri

Perilaku kekerasan yang tergolong sadis, sampai-sampai minum darah dan makan daging musuh (sesama manusia) dalam sebuah konflik kerap kali dilatarbelakangi oleh perjuangan mempertahankan harga diri. Sebuah komunitas masyarakat ingin dihargai dan diakui eksistensinya sebagai sebuah etnis, agama atau suku. Penilaian yang merendahkan harga diri sebuah komunitas etnis berakibat pada munculnya resistensi atau semangat perlawanan kolektif. Isyarat awal mungkin hanya berupa sikap tidak senang merespon perlakuan komunitas etnis lain. Namun perlahan-lahan akan muncul letupan-letupan kecil seperti perkelahian antar pemuda di lapangan sepak bola, senggolan sepeda motor di jalan, rebutan tempat jualan di pasar tradisional, saling mengejek di jalan, dsb. Jika kita hanya melihat letupan-letupan kecil itu dan tidak mencoba mencermati rentetan persoalan

panjang sebelumnya maka bisa jadi muncul penilaian, "bodoh sekali mereka, persoalan sepele saja bisa saling bunuh". Persoalannya mungkin sepele, bahkan sangat sepele tetapi bisa menjadi masalah besar karena sudah ada potensi konflik sebelumnya, yaitu permusuhan panjang akibat pelecehan harga diri etnis. Letupan kecil hanya sebagai instrumen penyalur dari persoalan besar di belakangnya. Masalah yang lebih besar biasanya terbungkus dan berada di balik semua perilaku sepele itu.

Sebagai contoh terjadi pada konflik antar etnis Melayu vs Madura di Sambas, Kalimantan Barat tahun 1999. Awalnya hanya persoalan sepele. Pada tanggal 17 Januari 1999 seorang pemuda yang bernama Hasan dari etnis Madura diduga melakukan tindak pencurian di sebuah rumah milik warga etnis Melayu, tepatnya di Desa Parit Setia, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Sebagaimana biasa tindak pencurian tidak disukai oleh siapa pun, termasuk oleh warga di Desa Parit Setia. Para pemuda Desa Parit Setia mengejar, menangkap dan memukul si pencuri ramai-ramai lalu menyerahkannya kepada polisi setempat (Polsek Jawai). Namun setelah diinterogasi, polisi tidak menemukan cukup bukti untuk memproses kasus itu lebih lanjut sehingga pada hari itu juga Hasan dibebaskan. Hari berikutnya tiga orang pemuda warga Madura yang mengaku sebagai keluarga dan teman Hasan datang ke Polsek Jawai memprotes tindakan para pemuda Melayu yang dinilai main hakim sendiri. Mereka mengancam akan melakukan

pembalasan. Mendengar ancaman itu, kelompok pemuda etnis Melayu pun balik mengancam akan melakukan perlawanan. Tepat dua hari setelah kejadian saling mengancam itu pecah konflik besar yang meluas hampir mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Konflik pertama pecah bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, 19 Januari 1999 dan selanjutnya terus bergelora sampai akhir Maret 1999. Menurut data di kepolisian setempat, kerugian akibat konflik itu tercatat 177 orang tewas di tempat kejadian, 71 luka berat, 40 luka ringan, 2.185 rumah hangus terbakar, 315 rumah rusak dan 45 kendaraan bermotor dibakar. Kerugian terbesar dialami warga etnis Madura. Bahkan pada bulan Maret-April tercatat 21.626 warga etnis Madura diusir dari wilayah Kabupaten Sambas dan mengungsi ke Pontianak.

Menurut informasi dari beberapa orang wartawan yang meliput langsung di lapangan, termasuk seorang peneliti yang kebetulan sedang melakukan penelitian di wilayah Kalimantan Barat, ada beberapa tindakan dalam konflik itu yang dapat digolongkan sadis dan brutal. Sekelompok orang sengaja minum darah dan makan daging musuh. Tindakan itu diklaim sebagai penambah kekuatan dan semangat. Selain itu ada pula yang mengangkat dan membawa kepala manusia tanpa badan sebagai "hasil buruan" lalu diletakan di tempat tertentu secara berjejer. Semua itu dilakukan karena kemarahan yang luar biasa kepada kelompok etnis yang dinilai telah berlaku kasar, sombong, tidak menghargai adat-istiadat setempat,

melecehkan harga diri etnis setempat, dsb³.

Imej Musuh Dalam Konflik Primordial

Menurut D. Horowitz (1985) dalam buku *Ethnic Conflict and International Relations* (1995), penilaian yang merendahkan harga diri identitas (etnis) ke taraf yang hina tampak melalui imej musuh (*enemy image*) (Horowitz, 1985, ch. 4) yang sangat negatif. Spillmann dan Spillmann (1991, p. 71) mencatat bahwa imej negatif terhadap musuh selalu berakibat pada meningkatnya eskalasi kebencian, dan sekaligus menghambat proses pencapaian solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Imej musuh berkembang cepat dari mulut kemulut, dan mampu membangkitkan persepsi, perilaku dan emosi massa⁴. Hal ini dapat menjadi patologi umum dalam konflik primordial. Beberapa hal yang terkait erat dengan imej musuh, antara lain:

Pertama, stereotype. Menurut Allaport (1954, p.191), *stereotype* merupakan satu kepercayaan yang berlebihan, yang dikaitkan dengan kategori tertentu (*stereotype is an exaggerated belief associated with a category*). Semua orang yang masuk dalam kategori itu sama saja dan berbeda dari yang lain. Hal ini terjadi pada orang Madura, di mana orang Melayu selalu menganggap bahwa

³ Informasi ini diperoleh penulis di Pontianak dan Sambas ketika melakukan penelitian untuk kasus konflik yang sama, terutama berkaitan dengan rekonstruksi sosial pasca konflik 1999. Penelitian berlangsung 1 bulan lebih dari pertengahan Juni sampai akhir Juli 2003.

⁴ Lihat, Stephen Ryan, 1995, *Ethnic Conflict and International Relations* (Second Edition), Dartmouth: England, hlm. 87

semua orang Madura jahat, tidak tahu sopan santun, gampang membunuh orang meskipun persoalan sepele, sombong, dsb. Sebaliknya, orang Madura menilai orang Melayu sebagai *tengkuyung* (kerupuk= pengecut) malas bekerja, suka berpesta meskipun tidak punya uang, dsb. *Stereotype* menempatkan "musuh" pada posisi yang serba salah dan patut dimusuhi. Orang menutup diri terhadap secuil kebaikan pada kelompok etnis lain. Dunia seakan-akan hanya dibagi ke dalam dua bagian yang ekstrim, hitam dan putih. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok musuh semuanya hitam-jahat dan kelompok sendiri putih-tidak terdapat cacat cela sedikitpun.

Kedua, dehumanisasi di mana sisi manusiawi dan martabat etnis atau agama lain diserang dan dilecehkan. Musuh dianggap hanya setengah manusia, bahkan lebih baik dari binatang, gila dan tidak rasional (irasional). Conroy (1988, p. 14) mengutip kata-kata seorang Protestan di Belfast yang mengatakan, saya memperlakukan orang mereka (Katolik) seperti binatang karena itulah mereka. Terkadang label teroris pun muncul untuk menyebut musuh sebagai orang gila, berperilaku menyimpang, tidak manusiawi, dsb. Fisk (1950, p. 127) melakukan studi kasus di Libanon dan menemukan bahwa teroris disamakan dengan binatang, dan harus direndahkan. Kemudian orang Israel mengaggap aksi brutal mereka di Libanon sebagai upaya memberantas teroris, membasmi binatang jahat dan menyebut PLO sebagai sebagai setan liar, kangker dan kecoa⁵. Inilah ungkapan-ungkapan yang bermaksud mendegradasi kemanusiaan

musuh ke taraf yang paling hina. Dalam kasus di Kalimantan Barat, khususnya Sambas, ungkapan-ungkapan atau label-label yang dimaksud memang tidak sedramatis itu, namun dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam hal tertentu orang Melayu menilai orang Madura sebagai monyet yang tidak pernah kerja ladang tapi bisa panen jangung, bahkan hasilnya bisa melebihi orang yang kerja ladang. Orang Madura dinilai pandai mencuri jagung, lalu lari menyelamatkan diri. Selain itu, orang Madura juga dinilai tidak sopan, ngobrol dengan tamu kakinya kangkang di atas kursi seperti anjing yang sedang menunggu makan, dsb.

Ketiga, pengkambing-hitaman (*scapegoating*), di mana ada upaya untuk melempar tanggung jawab pada pihak lain. Upaya ini umumnya dilabeli dengan sebutan, tangan tersembunyi (*hidden hand*), hantu gentayangan (*malevolent ghost*), setan manipulator (*evil manipulators*). Mitchell (1981a, p. 107) menyebut dengan memakai istilah imej musuh boneka (*the puppet enemy image*)⁶. Dalam konflik di Kalimantan Barat pun terjadi hal seperti ini. Misalnya, pada tahun 2000 gubernur yang berkuasa berupaya merancang rekayasa pengkambing-hitaman dengan menciptakan kekacauan di Kota Pontianak. Maksudnya sangat jelas, ingin menghalangi proses pemilihan gubernur baru karena gubernur yang sedang berkuasa akan habis masa jabatannya. Dengan didukung polisi, tentara, dan para preman, sang gubernur menjalankan

⁵ loc.cit, hlm 88

⁶ ibid.,

sebuah skenario kurang elegan, yakni mengkambing-hitamkan etnis Madura yang tidak mau keluar dari tempat penampungan pengungsi di sebuah lapangan sepak bola. Ia bersama pengikutnya memprovokasi massa Melayu dan Dayak dari rumah ke rumah melalui yel-yel, "Madura kotor, bau busuk, harus diusir dari penampungan", dll. Sebagian warga memang sempat terprovokasi dan melakukan kekacauan, tetapi tidak sempat meluas karena sebagian besar warga Melayu dan Dayak tidak terprovokasi. Warga masyarakat yang terprovokasi pun akhirnya sadar bahwa mereka sedang diperalat sang gubernur dan para pengikutnya.

Harga Diri Ada di Alam Bawah Sadar

Sehubungan dengan tindakan kekerasan dalam konflik etnis menurut Stephen Ryan (1995, hlm. 77-78) terjadi karena pengalaman konflik dengan kekerasan meringsek masuk ke alam bawah sadar (baca: perasaan), bahkan secara sengaja ditarik ke wilayah perasaan. Pengalaman pahit saat terjadi konflik terus-menerus diingat dan selalu tampak dalam keseharian. Padahal semakin konflik dengan kekerasan itu tampak, semakin pedih dan terus terpeliharanya (*protracted*) konflik. Dalam konflik etnis misalnya, keterlibatan perasaan dan emosi jauh lebih dominan dibandingkan pikiran rasional.

Harga diri berada di alam bawah sadar, di wilayah perasaan dan emosi. Lebih dari itu, ikatan identitas etnis, yang membedakannya dengan ikatan identitas etnis lain pada intinya bukanlah sebuah pilihan bebas yang mengandaikan keterlibatan rasio, tetapi sebuah

pemberian (*given*). Orang tidak bisa memilih untuk menjadi orang yang beretnis Madura atau Melayu atau Sunda dan lainnya, karena memang tidak ada pilihan itu. Kalaupun ada pilihan itu hanya terjadi pada leluhur. Namun menanyakan kepada leluhur, atas alasan apa mereka memilih menjadi orang yang beretnis A, B, D, dst, juga tidak relevan. Karena persoalannya bukan pada alasan memilih, tetapi spirit atau semangat yang menjiwai adab-budaya seorang manusia atau sekelompok manusia. Semua itu berjalan tanpa disadari karena memang berada di alam bawah sadar manusia, alias sulit dipahami secara rasional. Singkatnya, setiap pribadi atau kelompok menerima ikatan identitas sebagai suatu yang berifat *given* tanpa melalui proses penerimaan yang melibatkan pikiran rasional. Saat menentukan kesepakatan untuk mengambil tindakan tertentu guna memerangi musuh bersama pun umumnya diawali dengan ritual mistis yang juga sulit dicerna akal sehat. Semua itu menjadi instrumen pelengkap aksi kekerasan dalam konflik etnis.

Dalam konflik identitas, kesepakatan-kesepakatan yang diambil tidak pernah melibatkan institusi-institusi formal seperti negara (pemerintah) atau institusi-institusi lain yang lebih kecil sebagai perpanjangan peran negara. Alasannya jelas, institusi-institusi formal bekerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, sedangkan institusi-institusi informal-adat tidak berdasarkan pertimbangan rasional. Institusi negara dari pusat sampai daerah tidak tepat atau kalah bersaing dengan tetua adat yang merancang upacara pemanggilan roh dalam tradisi etnis Dayak

atau tarian perang di Papua yang sarat dengan pesan mistis. Institusi informal dalam banyak hal, bahkan sulit disebut sebagai institusi karena ketidak-jelasannya. Misalnya peran seorang tokoh, baik tokoh adat, panglima perang maupun tokoh masyarakat yang ketokohnya dikenal hanya karena nenek moyangnya sebagai tokoh juga sangat tidak jelas. Pada situasi normal hidup sang tokoh tidak ada bedanya dengan masyarakat biasa, bahkan banyak warga tidak mengenalnya, tetapi menjelang atau pada saat konflik terjadi ia mendadak populer, anak kecil yang tidak ikut "perang" pun mengenalnya. Selain itu dalam beberapa kasus tokoh agama pun dianggap sakti. Semua kata-katanya harus dipatuhi.

Secara rasional keberadaan tokoh ini sulit untuk disebut sebagai institusi atau lembaga karena syarat minimal sebuah lembaga saja tidak terpenuhi. Sang tokoh hanya seorang diri, tidak memiliki struktur yang jelas, dimana atasan dan bawahan. Namun dalam kenyataan peran tokoh ini mampu menjalankan fungsi sebuah lembaga, sebagaimana layaknya lembaga formal. Ia mampu menciptakan hukum atau aturan dalam waktu singkat dan langsung diterapkan. Semua orang patuh padanya, tanpa membantah. Hal ini terjadi karena ada ikatan emosional antara sang tokoh dengan warga masyarakat se-etnis. Lagi-lagi ada di alam bawah sadar, diman sulit dipahami secara rasional.

Dalam konflik antar etnis di Sambas, seluruh tindakan yang dilakukan baik oleh warga Melayu maupun Madura semata-mata karena ikatan emosional yang terwujud dalam perasaan se-etnis,

bukan hasil pertimbangan-pertimbangan rasional. Perasaan se-etnis merupakan energi penggerak utama yang mendorong mereka untuk terlibat dalam kekerasan, mulai dari penyiksaan sampai pembunuhan. Bahkan pada saat mereka meminum darah dan makan daging musuh, selalu mengucapkan kata-kata, "Melayu bukan *tengkuyung* (kerupuk), Melayu bukan kerupuk". Kata-kata ini diklaim sebagai penguat ikatan etnis dan sekaligus penambah semangat untuk terus memburu musuh dari rumah ke rumah, di semak-semak, hutan maupun di ladang.

Sehubungan dengan tindakan sadis dan brutal dalam konflik identitas - interkomunal, peran institusi formal seperti negara hampir tidak ada⁷. Meskipun tetap harus diakui bahwa para petualang politik kerap kali memanfaatkan konflik etnis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Atau bahkan hubungan yang tidak harmonis antar etnis di suatu daerah sengaja diperkeruh para aktivis politik untuk memuluskan agenda politik mereka. Dalam konflik antar etnis, yang berperan

⁷ Ketika terjadi konflik antar etnis Melayu dan Madura tahun 1999, peran institusi formal seperti pemerintah setempat tidak berpengaruh sama sekali, terutama untuk menghentikan konflik. Peran mereka hanya sebatas memberi himbauan moral agar pihak yang bertikai mengakhiri konflik. Namun kenyataannya pihak-pihak yang bertikai tidak pernah menghiraukan. Ketika terjadi insiden pertama di Desa Parit Setya, pemerintah dan aparat keamanan diharapkan bisa berperan tetapi kenyataannya tidak mampu dan terkesan tidak serius menangani insiden itu sehingga terjadi serangkaian insiden berikutnya, yang pada akhirnya pecah kerusuhan besar-besaran. Ketika terjadi amukan massa Melayu, pemerintah dan aparat keamanan praktis tidak berfungsi, bahkan

besar adalah istitusi informa-irasional yang disebut lembaga adat. Lembaga adat mungkin tidak tampak karena memang tidak jelas bentuk fisiknya, namun daya penggerakannya luar biasa besar. Satu-satunya yang tampak adalah tokoh adat. Ketika terjadi konflik, aturan atau hukum yang dipakai juga tidak jelas, sangat tergantung pada peran tokoh. Sang tokoh adat menciptakan hukum sendiri dan diberlakukan bagi seluruh warga se-etnis. Sebaliknya etnis lawan mempunyai aturan atau hukum sendiri, yang juga berlaku untuk seluruh etnisnya. Kedua belah pihak tidak pernah bersepakat tentang aturan main bersama dalam konflik, sebagaimana terjadi dalam konflik atau perang antar negara. Dalam konflik atau perang antar negara selalu ada aturan hukum perang yang telah disepakati di dunia internasional. Ketika terjadi perang kedua belah pihak yang bertikai harus patuh pada kesepakatan internasional itu, dan jika tidak lembaga internasional seperti PBB akan memberi sanksi.

Oleh karena tidak ada aturan main atau hukum yang disepakati bersama dalam konflik interkomunal, maka tindakan apa pun yang dilakukan pihak-pihak yang bertikai dianggap sah-sah saja. Membunuh, mencincang, membakar hidup-hidup, memakan daging dan minum darah musuh tidak dipertanggungjawabkan kepada siapa pun, termasuk kepada warga se-etnis. Tanggung jawab satu-satunya adalah pada diri sendiri atau individu. Individulah yang menentukan segalanya. Sehubungan dengan tindakan minum darah dan makan daging musuh saat

konflik berlangsung diakui erat terkait dengan ritual dan kepercayaan masing-masing kelompok etnis. Misalnya, minum darah segar dan makan daging musuh akan menambah kekuatan dan keberanian sehingga siapa pun yang percaya dan melakukan hal itu pasti akan m e n d a p a t k a n k e k u a t a n . Pertimbangannya bukan soal pantas atau tidak pantas, manusiawi atau tidak manusiawi, tetapi mau punya kekuatan dan keberanian atau tidak. Tambahan pula, setiap orang yang melakukan hal itu berada dalam kondisi tidak sadar diri atau trans. Bahkan seorang tokoh masyarakat etnis Dayak, yang juga ikut ambil bagian dalam konflik 1999 mengatakan, "orang yang terlibat dalam konflik sampai membunuh, minum darah dan makan daging musuh bukanlah orang yang sebenarnya, tetapi hanya pinjam tubuh karena yang menggerakkan dia adalah roh leluhur atau nenek moyang dari gunung gunung. Dalam keadaan sadar siapa pun orangnya pasti tidak mau melakukan itu, melihat darah dan kepala yang ditenteng saja tidak berani ", katanya. Namun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa minum darah dan makan daging musuh saat terjadi konflik disadari sepenuhnya. Yang dipikirkan saat itu bukan soal pantas atau tidak pantas, tetapi menggunakan kesempatan untuk melampiaskan segala kemarahan pada etnis yang dimusuhi⁸.

⁸ Hal ini dikatakan seorang Bapak di Desa Parit Setia yang juga terlibat dalam konflik tahun 1999 ketika di tanya, bagaimana perasaannya saat minum darah dan makan daging musuh saat terjadi konflik.

Kesimpulan

Melihat akibat yang ditimbulkan konflik, maka semua pihak harus sungguh-sungguh mencermati fenomena ini. Konflik antar negara berdampak pada pupusnya kedaulatan sebuah negara karena terpaksa tunduk pada negara kuat. Membicarakan kedaulatan negara sama dengan memberi perhatian pada harga diri sebuah bangsa. Jika sebuah negara terpaksa tunduk pada negara lain maka harga dirinya pun tercabik-cabik. Negara yang secara fisik lemah pasti akan melawan, bagaimanapun caranya. Karena melawan, meskipun pada akhirnya kalah adalah bukti bahwa negara itu masih memiliki harga diri. Hal yang sama pun terjadi dalam konflik antara etnis, di mana ada etnis yang seharusnya hidup merdeka terpaksa menerima perlakuan tidak adil dari etnis lain. Harga diri sebuah etnis dilecehkan, tidak diakui, tidak dihargai, dsb. Karena itu etnis yang merasa dilecehkan akan selalu mencari kesempatan untuk melakukan perlawanan kolektif; kalau bukan sekarang, nanti pasti ada kesempatan. Itulah yang mereka yakini. Perlakuan yang terkesan mengejek bahkan menyentuh dan meyodok harga diri, cepat atau lambat akan menghadapi perlawanan. Itu berarti pula, potensi konflik terus terpelihara dan selalu menunggu kesempatan untuk melampiaskan kemarahan.

Konflik di tingkat negara mungkin bisa berakhir melalui komitmen bersama untuk mematuhi perjanjian damai. Tambahan pula, sehari-hari pihak yang berkonflik hampir tidak pernah berhubungan langsung sehingga bisa lebih cepat

menghilangkan memori buruk perang. Namun tidak demikian halnya dengan konflik antar etnis. Meskipun telah menandatangani kesepakatan damai dan masing-masing pihak berjanji untuk patuh pada kesepakatan itu namun karena sehari-hari masih sering berhubungan langsung dengan pihak yang pernah dimusuhi maka memori buruk konflik pun selalu diingat.

Terkait kecenderungan semakin meningkatnya intensitas konflik antar etnis dalam satu negara, peran negara atau pemerintah menjadi sangat penting, terutama untuk mengantisipasi terjadi konflik terbuka. Negara menjadi penentu utama. Untuk konflik yang dilatarbelakangi perjuangan mempertahankan harga diri, entah atas nama etnis, agama, suku atau adat-istiadat, negara sebetulnya bisa mengantisipasi dengan kebijakan yang taat pada asas keadilan hukum tanpa diskriminasi. Sebab kebijakan atau penegakkan hukum yang diskriminatif terhadap komunitas masyarakat tertentu secara tidak langsung merendahkan harga diri mereka. Dan karena itu mereka pasti melawan, bagaimanapun caranya. Patut diketahui bahwa perjuangan mempertahankan harga diri tidak mengenal kategori kuat atau lemah secara fisik maupun jumlah. Bagi komunitas masyarakat yang lemah secara fisik atau jumlah, melakukan perlawanan saja sudah cukup. Bagi mereka, melakukan perlawanan menunjukkan bahwa mereka masih memiliki harga diri. Namun akibatnya tetap saja kerusakan dan malapetaka bagi banyak orang.

Saat ini konflik dengan kekerasan, khususnya di Indonesia umumnya masih berupa kecurigaan antara etnis satu dengan etnis yang lain, antara agama satu dengan agama yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, dan tak jarang kecurigaan itu dilamatkan kepada pemerintah yang berkuasa. Pemerintah dicurigai karena disangsikan komitmennya untuk menjaga dan memelihara keharmonisan di tengah masyarakat. Bahkan pemerintah dituduh sengaja menciptakan kekacauan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sehubungan dengan konflik yang pernah bahkan sering terjadi di wilayah Kalimantan atau daerah lain seperti Poso dan Papua, di satu pihak menjadikan daerah-daerah itu sebagai laboratorium bagi para peneliti yang penasaran ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, tetapi di lain pihak menjadi ujian berat bagi pemerintah yang berkuasa, terutama pemerintah setempat untuk secara hati-hati menerapkan berbagai pendekatan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Yang jelas pemerintah harus menghindari kebijakan-kebijakan atau penerapan hukum yang bernuansa diskriminatif. Sebab regulasi kebijakan yang diskriminatif dan tidak dilandasi semangat keadilan akan mendorong terjadinya konflik di tengah masyarakat. Alih alih menciptakan keteraturan justru melahirkan ketidakteraturan. Ingin menciptakan keadilan tapi justru membunuh keadilan itu sendiri. Idea hukum yang dilandasi keadilan justru terbang pilih dalam pelaksanaannya. Komunitas etnis yang satu kebal hukum tapi tidak berlaku bagi etnis yang lain.

Komunitas agama yang satu diberikan kemudahan tertentu tapi tidak berlaku bagi yang lain. Komunitas profesi yang satu diberikan hak istimewa tapi tidak berlaku bagi profesi yang lain. Akibatnya, ada kelompok masyarakat yang selalu merasa terancam, terpinggirkan, tidak diakui sebagai bagian dari kelompok besar bangsa, namun sebagian lagi merasa memiliki bangsa ini dan karena itu pantas mendapatkan hak-hak istimewa, dsb. Perlakuan diskriminatif yang dikukuhkan dengan kebijakan formal jelas-jelas akan menciptakan permusuhan di tengah masyarakat. Ini "cara efektif" memelihara konflik.

Bahan Bacaan

- Allen, I.L, 1983, *The Language of Ethnic Conflict*, Columbia University Press: New York
- Allaport, G.W, 1954, *The Nature of Prejudice*, Beacon Press: New York
- Bamualim, S. Chaider dan Helmanita, Kalina (Ed.), 2002, *Communal Conflict in Contemporary Indonesia*, Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Jakarta kerja sama dengan The Konrad Adenauer Foundation: Jakarta, Indonesia
- Conroy, M, 1988, *War as a Way of Life: A Belfast Diary*, Heinemann: London
- Clammer, J, 1986, Ethnicity and the Classification of Social Differences in Plural Societies in Paranjpe, Ac., ed, *Ethnic Identities and*

Prejudice: Perspectives from the Third World, E. Brill: Leiden

Fisher, Simon,dkk, 2000, *Mengelolah Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak (terjemahan)*, The British Council Indonesia (SMK Grafika Desa Putra): Jakarta, hlm. 44-45

Ryan, Stephen 1995, *Ethnic Conflict and International Relations (Second Edition)*, Darmouth: England